

KESERAKAHAN, KEMISKINAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN ¹⁾

Pintu Gerbang Pencermatan dan Penguatan Nilai-nilai Budaya Indonesia pada Milenium ke-3

Tri Pranadji

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan lingkungan dan sumberdaya alam sangat besar, namun masyarakat cenderung meremehkannya dan menganggap sebagai suatu kewajiban (Atmosukarto, 2005). Ragam nilai budaya yang dipunyai masyarakat daerah di Indonesia cukup tinggi (Welirang, 2005), dan nilai-nilai budaya tersebut seharusnya dapat dijadikan "bahan baku" untuk membangun nilai-nilai budaya bangsa yang kuat pada milenium 3. Saat ini, baik nilai-nilai budaya maupun lingkungan, mengalami perusakan intensif. Jika hal ini dibiarkan berkelanjutan, maka sebelum abad 21 berakhir diperkirakan bangsa Indonesia akan terhapus dari peta pergaulan masyarakat dunia.

Dengan sintesa pengetahuan dan nilai-nilai moral (budaya) manusia akan dapat menghormati batas kemampuan atau hukum alam. Istilah *non nisi parendo vincitur* (hanya dengan mematuhi hukum-hukum keterbatasannya manusia atau masyarakat dapat mengendalikan lingkungan hidupnya; dikutip bebas dari buku "Gelombang Pasang Emansipasi", karya Prof. W.F. Wertheim, 1976). Karena agresivitas dan keserakahannya, bukan saja telah mengantarkan umat manusia pada jalan pemusnahan bersama, melainkan juga mengundang "kekuatan" alam melakukan pembalasan terhadap ulah manusia yang tidak mematuhi hukum dan keterbatasan alam. Selama masyarakat (manusia) tidak mampu melakukan pembebasan diri dari belenggu nafsu keserakahannya, selama itu pula ancaman balasan dari kekuatan alam terhadap pemusnahan masyarakat akan terus menghantui dan mengarah pada kenyataan. Kemiskinan adalah rangkaian akibat dari budaya keserakahan dan pelanggaran terhadap keteraturan alam.

Tema Seminar Nasional V ISI "Indonesia yang Bebas Korupsi, Rukun dan Mandiri" mempunyai kaitan erat dengan kerusakan lingkungan di berbagai daerah di wilayah Indonesia, yang menurut Lombart (2000) dan Thijsse (1982), dari

¹⁾ Disampaikan pada Seminar Nasional V Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) bertema "INDONESIA YANG BEBAS KORUPSI, RUKUN DAN MANDIRI", 20 September 2005, Gedung Pertemuan BKKBN, Jakarta.

dekade ke dekade menunjukkan gejala terus meningkat. Kerusakan lingkungan yang telah meluas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal rasa syukur. Selain itu juga sangat jauh dari citra “bebas korupsi, rukun dan mandiri”. Kekerasan terhadap lingkungan yang meluas juga bisa dipandang sebagai bentuk akhir dari peradaban masyarakat bangsa yang menuju kehancuran bersama (*tragedy of the common*), atau setidaknya mencerminkan kesejajaran dengan berbagai bentuk kekerasan lain (misalnya: kekerasan antar kelas sosial, antar generasi, antar suku, antar sex, antar kelompok “partai politik” atau antar pelaku ekonomi). Citra masyarakat tidak berpendidikan (*illiterate society*) dan suka menggunakan ijazah palsu), mestinya sangat cocok dijadikan label bagi bangsa Indonesia, suatu bangsa yang tidak mampu menghindarkan diri dari penghancuran sumber kehidupan bersama (“lingkungan”) secara berkelanjutan. Layaknya seekor keledai yang selalu terjerembab dan masuk pada lobang yang sama.

Euforia pembangunan disejajarkan sebagai pemacuan pertumbuhan ekonomi telah berlangsung relatif lama, dan mendapat penyempurnaan oleh kalangan ekonomi klasik setelah Perang Dunia II. Pada awal 1970-an di tingkat dunia, oleh Kelompok Roma (*Club of Rome*) telah digagas pemikiran tentang batas-batas pertumbuhan (*limits to growth*), yang tujuannya untuk mengingatkan tentang adanya keterbatasan sumberdaya alam dan lingkungan untuk “melayani” keinginan manusia. Dua dekade kemudian (1992) di Rio de Janeiro ditekankan kembali bahwa kesejahteraan manusia adalah perhatian utama pembangunan berkelanjutan (*that human beings are at the centre of concern for sustainable development*). Pesan utama dari dua kejadian tersebut adalah bahwa para pakar pembangunan dunia memberikan tanda bahaya (“lampu merah”) bahwa kegiatan yang “berkedok pembangunan” telah menyimpang dari sasaran semula. Ada 2 (dua) penyimpangan besar yang muncul, yaitu:

- (1) Terjadinya perusakan atau penghancuran sumberdaya alam dan lingkungan yang parah akibat aktivitas pembangunan yang berporos pada “pertumbuhan ekonomi” dan perebutan aset ekonomi strategis oleh pelaku-pelaku ekonomi kapitalistik.
- (2) Pemiskinan pada masyarakat agraris di pedesaan dan masyarakat di negara-negara dunia ke tiga, bersamaan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat di kelompok maju juga diikuti dengan memperkuatnya kesenjangan yang semakin tajam antara kelompok “kaya” (berjumlah sedikit) dan “miskin” (berjumlah banyak).

Ada 3 (tiga) penyebab terjadinya kerusakan lingkungan pada skala masif, yaitu: *pertama*, tidak terkendalinya nilai-nilai keserakahan yang mengiringi kegiatan pembangunan ekonomi yang berwatak kapitalistik (“rakus”). Nilai-nilai keserakahan yang tidak terkendali inilah yang mengantarkan bangsa Indonesia meluncur sebagai bangsa yang paling korup dan menggiring pada jalur “pemusnahan bersama”. *Kedua*, tidak mempunyainya kalangan berpendidikan meyakinkan penyelenggara negara untuk membangun masyarakat mandiri yang

cerdas (*smart civil society*), yang menempatkan aspek pengelolaan lingkungan secara kolektif pada posisi yang strategis. *Ketiga*, relatif besarnya kelompok lapisan masyarakat miskin yang kehidupannya sangat tergantung pada sumberdaya alam dan lingkungan; khususnya lahan untuk kegiatan pertanian subsistensi.

KERUSAKAN NILAI –NILAI BUDAYA DAN LINGKUNGAN

Sengitnya perdebatan tentang pilihan konsep pembangunan yang dinilai lebih tepat hingga kini masih terus berlangsung. Ada dua kelompok besar ilmuwan yang saling berseberangan, yaitu kelompok ilmuwan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi di satu sisi, dan yang mementingkan keadilan di sisi lain. Kritik tajam pemenang hadiah Nobel Ilmu Ekonomi (Amartya Sen) terhadap pertumbuhan ekonomi (yang diikuti dengan cucuran darah, keringat dan air mata) tetap tidak menyurutkan nilai-nilai “keserakahan ekonomi” tetap berjaya di atas penderitaan orang banyak. Demikian juga kenyataan empirik, bahwa penyusupan nilai budaya “keserakahan ekonomi kapitalis” dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia dalam tiga dekade terakhir telah mendatangkan kerusakan pada berbagai nilai-nilai budaya lokal, yang pada gilirannya menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Saat beberapa kali dikritisi oleh para pakar sosial dan lingkungan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan yang masif sebagai konsekuensi bagi penggunaan pendekatan pembangunan yang keliru, atau dengan kata lain tidak menekankan aspek keadilan dan keberlanjutan lintas generasi, tanggapan dari perancang pembangunan ekonomi (EKUIN) tidaklah proporsional. Kerusakan ini oleh kalangan penyelenggara pembangunan hanya dianggap sebagai bagian dari eksese pembangunan ekonomi.

Ahli ekologi masyarakat, seperti: Steward (1955), Dumont (1971) dan Bookchin (1982), jauh hari telah menyatakan bahwa (tatanan) sosio-budaya sangat menentukan sistem masyarakat dalam mengelola lingkungan dan sumberdaya alam. Bahkan Odum (1977) mengatakan bahwa terjadinya gejala *over-shoot* dalam pengelolaan sumberdaya alam berakar pada tidak terkendalinya nilai keserakahan yang berkembang di masyarakat. Terjadinya kerusakan lingkungan yang berkelanjutan, terutama oleh tindakan over eksploitasi secara kolektif dan terorganisir, merupakan cerminan kerusakan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Terbentuknya kelas-kelas sosial yang “memiliki hak istimewa” terhadap yang lain menggambarkan bagian dari kerusakan atau ketidakmatangan budaya. Kematangan budaya, yang dilandaskan pada kemajuan ilmu pengetahuan, adalah bahwa antar anggota masyarakat dapat bekerjasama atas dasar kesederajatan. Dengan dasar kesederajatan ini mekanisme *check and balance* dapat ditransmisikan dalam tatanan masyarakat madani (*civil society*) yang sehat.

Dengan memperhatikan terjadinya kerusakan lingkungan secara masif di berbagai tempat maka dapat dikatakan bahwa kerusakan budaya bangsa Indonesia

saat ini telah mencapai tingkat yang gawat. Mekanisme *check and balance* untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan bisa dikatakan tidak bisa berjalan efektif. Hak-hak istimewa kaum elit yang tidak terkendali dalam memanfaatkan kekayaan bersama, membuat kerusakan lingkungan dari waktu ke waktu terus meningkat. Pendekatan pembangunan yang mengesampingkan aspek keadilan dan penguatan sosio-budaya bangsa tampaknya telah membawa dampak yang sangat serius terhadap perusakan lingkungan secara multi dimensional.

Secara keilmuan (ekologi manusia), indikasi terjadinya kerusakan lingkungan sebenarnya sudah teramati lebih dari setengah abad lalu. Secara awam, dalam 2-3 tahun terakhir, dari pemberitaan berbagai media massa (elektronik dan cetak) dan dari pengamatan dengan mata telanjang di lapangan penulis menemukan berbagai kerusakan lingkungan yang sangat serius, terutama yang diakibatkan langsung oleh pendekatan pembangunan yang berporos pada kerusakan nilai-nilai budaya, yaitu:

1. Terjadinya peningkatan pencemaran perairan di kawasan padat penduduk, dan menyebabkan masyarakat kecil mendapat musibah dan tidak mendapat pembelaan yang wajar, merupakan petunjuk adanya pemberian hak-hak istimewa pada kelompok elit tertentu dan pengabaian hak-hak orang banyak dan masyarakat setempat. Kasus pencemaran logam berat di Teluk Buyat (Sulawesi Utara) menyebabkan berbagai penderitaan pada penduduk setempat. Kasus pencemaran di Teluk Jakarta, akibat limbah industri, menyebabkan sejumlah besar ikan dari berbagai jenis mengalami kematian. Kasus pencemaran Sungai Landak (Kalimantan Barat) akibat penggunaan merkuri (Hg) untuk penambangan (emas) liar di daerah hulu sungai menyebabkan masyarakat di sepanjang perairan Sungai Landak menderita gatal-gatal dan penyakit kulit yang masih asing.
2. Intensifnya penghancuran hutan mangrove di sepanjang perairan pedalaman (terutama pantura Jawa), akibat pembukaan pertambakan udang intensif, pendirian bangunan (industri, pemukiman dan prasarana lain) memang telah menyebabkan banjir musiman yang menyengsarakan masyarakat kecil, pencemaran permukaan pantai (kota-kota di pantura Jawa dalam 20 - 25 tahun terancam tenggelam), musnahnya berbagai spesies biota laut, abrasi pantai, dan berbagai kerugian sosio-lingkungan lain yang belum terhitung. Selain itu, hal ini juga menyebabkan jutaan keluarga nelayan kecil semakin kesulitan mendapatkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya di perairan sekitar 3 – 5 km dekat pantai.
3. Sejalan dengan “butir 2” terjadi juga penghancuran terumbu karang akibat pencemaran limbah industri, penggunaan bom dan bahan kimia dalam penangkapan ikan, ekspansi kegiatan eksploitasi pertambangan lepas pantai, pencemaran transportasi laut, dan pengambilan liar untuk diperdagangkan. Hal ini terjadi akibat melemahnya nilai budaya lokal terhadap pengawasan dan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Akibat di bidang sosial

ekonomi, sebagian besar masyarakat kecil di pantai semakin kesulitan untuk bertahan hidup.

4. Perusakan hutan tropis akibat praktek penebangan tidak terkendali oleh pemegang HPH, pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan dan pertanian semusim, dan *illegal logging*, menunjukkan betapa lemahnya budaya pengelolaan terhadap sumberdaya milik bersama (*common property*). Perusakan hutan ini bisa dipandang sebagai adanya difusi budaya “segi tiga setan”, yaitu terjadinya kolusi antara pelaku ekonomi pasar (yang semata-mata bermotif mencari keuntungan ekonomi jangka pendek) , birokrat pemerintah (yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi), dan elit adat (yang kehilangan sifat amanah) untuk merampas sumberdaya milik bersama secara terorganisir. Tampaknya “budaya *mutual-benefit* baru” menyusup secara sistematis dalam tatanan masyarakat lintas tradisi, hirarkhi, dan wilayah administrasi.
5. Terjadinya penyerbuan lahan milik PT. Perhutani oleh “pasukan petani lapar tanah” di banyak daerah, karena mendapat dorongan dan aba-aba pemimpin populis, menyebabkan kerusakan sistem hidrologi yang serius dalam satuan wilayah DAS di banyak tempat di Jawa. Akibatnya masalah air, yang dahulu mudah didapat secara “gratis” dan menjadi bagian dari milik bersama, sekarang ini sudah terkonversi secara sosio-politik-ekonomi menjadi barang langka. Masalah air pada masyarakat komunal di pedesaan berhasil dipaksa masuk wilayah ekonomi pasar (uang). Peraturan tentang pengelolaan sumberdaya air (melalui UU No. 7 Tahun 2004, tentang Sumberdaya Air) menjadikan beban masyarakat miskin bertambah besar, dan azas keadilan dalam pengelolaan sumberdaya air hanya menjadi slogan di atas kertas.
6. Ekspansi usahatani tanaman semusim ke kawasan lahan kering di perbukitan, akibat tekanan kemiskinan dan desakan kebutuhan subsistensi pada sebagian besar masyarakat pedesaan, menjadi tidak dapat dihindarkan. Hal ini sekaligus memberikan gambaran bahwa transformasi sosial di pedesaan selama lebih dari setengah abad mengalami kegagalan, dan perekonomian masyarakat pedesaan selalu dalam posisi marginal. (Jika saja UUPA 1960 dijalankan dengan konsisten, peluang terjadinya kesejajaran antara modernisasi dan pembangunan pedesaan akan sangat terbuka). Kerusakan agroekosistem lahan kering dapat dipandang sebagai bagian dari jebakan kemiskinan (*poverty trap*) di pedesaan, yang berawal dari kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada nilai keadilan, kebersamaan (kerukunan), dan kemandirian masyarakat lokal.
7. Peningkatan pencemaran udara (misalnya di kawasan Jabotabek) yang intensif, akibat aktivitas berbagai jenis industri, dan asap akibat pembakaran hutan tanaman industri (hingga melintasi batas negara) menggambarkan lemahnya penegakkan prinsip keadilan sosial. Masyarakat banyak telah menderita serius akibat pencemaran (tanpa kompensasi), sedangkan pemilik

dan pengelola usaha secara sepihak menikmati keuntungan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa bukan saja pemerintah tidak mampu berperan sebagai “polisi keadilan”; melainkan juga bahwa nilai-nilai budaya yang mengarahkan pada kerukunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada gilirannya hal ini menyebabkan ketidak-percayaan masyarakat (*social distrust*) terhadap pemerintah semakin meningkat. Kemandirian yang hanya diberlakukan pada kalangan tertentu justru menjadi pendistorsi utama bagi upaya penguatan nilai kerukunan, yang mana nilai kerukunan ini seharusnya bias diarahkan pada terwujudnya nilai kemandirian secara kolektif dan inklusif.

8. Terjadinya pendangkalan waduk besar (seperti: Kedung Ombo, Karangates, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), kerusakan kawasan bantaran sungai, pelumpuran berat muara sungai, dan penurunan kesuburan lahan di kawasan dataran tinggi dapat dipandang sebagai bagian dari kerusakan lingkungan bertaraf nasional. Hal ini sekaligus menunjukkan kurang tepatnya pendekatan pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu masih cenderung mengabaikan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

KESENJANGAN MULTI DIMENSIONAL

Terjadinya kemiskinan massal dan kesenjangan sosial yang tajam adalah resultan dari kerusakan nilai-nilai budaya di tingkat masyarakat lokal, bangsa dan global. Theodore Schultz, pemenang Nobel Ilmu Ekonomi 1979, menyatakan bahwa ilmu ekonomi hanya cocok untuk menerangkan perilaku orang kaya (Hubisch, 1999). Sebagaimana orang kaya, para pakar ekonomi umumnya sangat kesulitan menjelaskan terjadinya gejala kemiskinan massal, dan juga kesulitan dalam memahami perilaku orang miskin. Tidak saja di Indonesia, para ahli ekonomi tingkat dunia pun sulit menjelaskan gejala kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat dunia ketiga dan yang tinggal di pedesaan. Hampir selalu didapatkan bahwa di mana terjadi kerusakan lingkungan yang parah di situ pula akan dijumpai gejala kelaparan, kerusakan, dan keterbelakangan yang parah.

Seorang analis kritis dari Bank Dunia, Grootaert (1998), menyebutkan bahwa masalah kesenjangan sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan berakar pada tidak berkembangnya nilai-nilai budaya dan modal sosial dalam masyarakat setempat. Dalam perspektif *deep ecology*, yang menentukan tingkat kerusakan lingkungan adalah ideologi atau nilai-nilai (budaya) yang melatar-belakangi tindakan masyarakat secara kolektif. Semakin tidak dapat diekspresikan ideologi dan nilai-nilai budaya yang akrab dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, semakin sulit dihindari terjadinya kerusakan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai budaya adalah penentu utama seberapa jauh aktivitas suatu masyarakat akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain itu dapat dikatakan juga bahwa nilai-nilai budaya mempunyai pengaruh sangat besar terhadap berbagai kesenjangan yang bersifat multi dimensional pada suatu sistem masyarakat.

Dimensi kesenjangan yang menentukan kerusakan lingkungan mencakup aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dalam bentuk budaya material kesenjangan multi dimensional dapat dilihat, antara lain dari hubungan antara :

- (1) Masyarakat pertanian tradisional dan masyarakat industri, yang masing-masing merepresentasi sebagian besar masyarakat terbelakang dan sebagian kecil masyarakat yang relatif maju di bidang ekonomi.
- (2) Masyarakat yang berada di kawasan bagian hulu dan hilir DAS; yang masing-masing merepresentasi sebagian besar masyarakat yang kurang mendapat dukungan kebijakan pemerintah (di bidang modal finansial, prasarana, pendidikan dan keterbukaan komunikasi) dan sebagian kecil masyarakat yang mendapat dukungan kebijakan pemerintah.
- (3) Masyarakat yang berada di kawasan perkotaan dan pedesaan; yang masing-masing merepresentasikan sebagian kecil masyarakat yang tingkat kesejahteraan ekonominya relatif baik dan sebagian besar yang tingkat kesejahteraan ekonominya relatif buruk.
- (4) Masyarakat yang berada pada peradaban ekonomi pasar domestik dan ekonomi kapitalis global; yang masing-masing merepresentasikan sebagian besar masyarakat dengan nilai tambah ekonomi relatif rendah dan sebagian kecil masyarakat dengan nilai tambah ekonomi tinggi.
- (5) Masyarakat yang berada pada pusat kekuasaan dan pinggiran; yang masing-masing merepresentasikan sebagian kecil masyarakat dengan berbagai hak istimewa dan sebagian besar masyarakat yang nyaris tidak memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan secara publik.

Selama kesenjangan yang bersifat multi dimensi tidak diatasi, selama itu pula kerusakan lingkungan dari waktu ke waktu akan terus berlangsung. Penguatan nilai-nilai budaya masyarakat merupakan kunci pembuka untuk mengatasi masalah kesenjangan dan kerusakan lingkungan. Namun penguatan nilai-nilai budaya masyarakat tidak akan berjalan efektif jika tidak disertai langkah-langkah berikut :

- (1) Dibutuhkan adanya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, terutama dilihat dari tingkat pengetahuan tentang kerusakan lingkungan, daya empati untuk menggalang kerjasama (*cooperative*) yang efektif dan efisien, serta apresiasi yang tinggi terhadap pengetahuan dan pemecahan masalah secara keilmuan.
- (2) Kepemimpinan lokal yang kuat, yang dicirikan oleh integritas personal yang tinggi, visi ke depan yang kuat dan implementatif, daya inspirasi yang kuat terhadap anggota masyarakat yang dipimpinnya, tindakan yang altruistik (untuk mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat), memiliki keunggulan pengetahuan yang kuat terhadap lingkungan, berkemampuan tinggi dalam memecahkan konflik (*conflict resolution*) secara elegan,

memiliki daya komunikasi yang tinggi, berfikir dan bertindak rasional, dan menegakkan sistem kolektivitas kerja yang tinggi.

- (3) Manajemen sosial yang terkait dengan sistem pengambilan keputusan yang mencerminkan asas kolektivitas, transparansi (dalam bentuk informasi dan argumentasi, akuntabilitas yang jelas, rasionalitas, demokratis dan bisa dilakukan koreksi dan audit secara terbuka. Manajemen sosial yang demikian ini sifatnya sangat dinamik, terutama dalam kaitannya dengan pemecahan masalah lingkungan yang bersifat dinamik dan holistik.
- (4) Mengembangkan tatanan sosial yang sehat dan memberi jaminan lebih baik bagi terwujudnya sistem interdependensi yang simetris, terutama melalui upaya mengurangi gejala kesenjangan multi dimensional yang berakar pada ketimpangan struktur sosial. Adanya gejala stratifikasi sosial yang polaristik, terutama tercermin pada semakin lebarnya jurang antara “si elit-kaya dan kuat dan kaum massa-miskin dan lemah”, mencerminkan struktur sosial yang kondusif untuk membangun bangsa Indonesia yang besar berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerukunan dan mandiri.

PENGUATAN NILAI-NILAI BUDAYA

Dengan diangkatnya tiga nilai (komposit) besar (yaitu: bebas korupsi, rukun dan mandiri) dalam Seminar Nasional V ISI bisa dikatakan bahwa semangat untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, sesuai cita-cita pendiri republik (*faunding fathers*) sebelum merdeka, telah terangkat kembali. Dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, nilai bebas korupsi bisa diartikan bahwa lingkungan (dan sumberdaya alam) adalah sumberdaya milik bersama yang bisa dijadikan sebagai pembangkit terwujudnya nilai keadilan (atau nilai bebas korupsi). Tidak dibenarkan seseorang individu atau kelompok masyarakat tertentu mengambil manfaat lebih dari sumberdaya milik bersama (lingkungan) dibanding individu atau kelompok lain tanpa alasan yang bisa dimengerti. Nilai bebas korupsi adalah bagian dari perwujudan nilai keadilan secara lintas spasial dan generasional.

Nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat umumnya bukanlah nilai budaya dasar, melainkan sudah merupakan gabungan atau komposit dari tiga atau lebih nilai budaya dasar. Pranadji (2005) berpendapat ada 12 (dua belas) nilai budaya dasar yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menilai apakah suatu bangsa atau masyarakat akan mengalami kemajuan dan keterbelakangan (Tabel 1). Nilai-nilai budaya dasar ini dapat diterapkan dalam berbagai tingkat pelaku sosial dan kegiatan tertentu yang dijalankan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Baik atau buruknya pengelolaan suatu lingkungan sangat ditentukan oleh nilai-nilai budaya dasar yang berkembang dalam suatu masyarakat. Tiga nilai komposit, yaitu: nilai bebas korupsi, kerukunan dan kemandirian dalam

pengelolaan lingkungan (tema Seminar ISI); juga dapat dilacak melalui kombinasi dari 12 nilai budaya dasar ini.

Tabel 1. Perbandingan Nilai-nilai yang Mencerminkan Kemajuan dan Keterbelakangan Suatu Individu, Komunitas Kecil dan Bangsa

Nilai-nilai Kemajuan	Nilai-nilai Terbelakang
Rasa malu & harga diri	<i>Rai gedheg</i> & rendah diri
Kerja keras	Kerja lembek
Rajin & disiplin	Malas & seenaknya
Hidup hemat & produktif	Boros & konsumtif
Gandrung inovasi	Resisten inovasi
Menghargai prestasi	Askriptif/primordial
Sistematik & terorganisir	Acak & difuse
Empati tinggi	Antipati tinggi
Rasional/impersonal	Emosional/personal
Sabar dan syukur	Pemarah dan penuntut
Amanah (<i>high trust</i>)	Tidak bisa dipercaya
Visi jangka panjang	Visi jangka pendek

Nilai-nilai budaya dasar yang mendukung terbentuknya nilai keadilan atau bebas korupsi adalah: harga diri dan rasa malu, kerja keras dan disiplin, hemat dan produktif, empati tinggi, rasional, sabar dan syukur, dan visi jangka panjang (lihat Tabel 2). Kemudian nilai-nilai pendukungnya yang penting adalah gandrung inovasi, menghargai prestasi, berpikir sistematis, dan amanah. Pendeknya masing-masing dari keduabelas nilai budaya dasar pasti mempunyai peran dalam pembentukan tiga nilai komposit yang dimaksud. Setiap nilai budaya dasar mempunyai bobot berbeda, terutama dikaitkan dengan nilai komposit yang dibentuk. Sekumpulan nilai budaya dasar digolongkan sebagai nilai esensial, dan sekumpulan nilai budaya dasar lainnya sebagai nilai penunjang. Nilai komposit bebas korupsi, yang dibentuk oleh tiga nilai esensial (rasa malu dan harga diri, empati, dan visi jangka panjang), merupakan “nyawa” kehidupan masyarakat bangsa.

Jika ditelusuri secara lebih mendalam, keduabelas nilai budaya dasar ini bukanlah sesuatu yang sangat asing. Ada tiga sumber penggalan nilai-nilai budaya, yaitu: nilai-nilai agama yang digali langsung dari kitab suci, nilai-nilai agama yang sudah dijadikan tradisi atau adat istiadat setempat, dan sintesa nilai-nilai baru yang dibangun melalui kesepakatan atau “kontrak sosial”. Proses yang menjadikan nilai-nilai budaya dasar ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di masyarakat memerlukan waktu yang cukup lama. Jarang sekali ditemukan bahwa proses aktualisasi nilai-nilai dasar dari luar berlangsung revolusioner, kecuali dipandu oleh seorang pemimpin kharismatik yang berpengetahuan luas.

Tabel 2. Hubungan antara Nilai-nilai Dasar dan Komponen (nilai komposit) Kemajuan Bangsa menurut Tingkat Kekuatannya

No.	Nilai-nilai dasar	Komponen Nilai Budaya Kemajuan Bangsa		
		Bebas Korupsi	Rukun	Mandiri
1	Rasa malu & harga diri	+++	+++	+++
2	Kerja keras	++	++	+++
3	Rajin & disiplin	++	+++	+++
4	Hidup hemat	+++	++	+++
5	Gandrung inovasi	++	++	+++
6	Menghargai prestasi	++	+	+++
7	Berpikir sistematis	++	+++	+++
8	Empati tinggi	+++	+++	++
9	Rasional/impersonal	+++	++	+++
10	Sabar dan syukur	++	+++	+++
11	Amanah (<i>high trust</i>)	++	+++	++
12	Visi jangka panjang	+++	+++	+++

Keterangan: (1) +++ = keterkaitan sangat kuat

++ = keterkaitan sedang

+ = keterkaitan kecil

(2) Pemuatan tanda (+) dalam table bersifat hipotetik dan masih perlu dikaji secara lebih kritis dan diuji secara empirik.

Sebagai sumberdaya milik bersama, lingkungan bisa dijadikan faktor pengikat keutuhan atau kerukunan suatu komunitas atau bangsa. Dari 12 nilai dasar (Tabel 1) ada 7 (tujuh) nilai dasar yang bisa dijadikan untuk membangun nilai kerukunan, yaitu: rasa malu dan harga diri, rajin dan disiplin, berpikir sistematis, empati tinggi, sabar, amanah dan berpikir dengan visi jangka panjang. Sedangkan 5 (lima) nilai dasar lainnya adalah nilai pendukung untuk mewujudkan kerukunan. Sama halnya pada nilai (komposit) bebas korupsi atau keadilan, maka masing-masing dari keduabelas nilai dasar mempunyai peran dalam membentuk nilai kerukunan di suatu masyarakat. Empati, amanah dan berpikir dengan visi jangka panjang, dan empati dapat digolongkan sebagai nilai esensial yang membentuk kerukunan masyarakat atau bangsa.

Sebagai sumberdaya milik bersama, lingkungan dapat dijadikan salah satu basis pengembangan nilai-nilai budaya bangsa yang kuat. Pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat secara strategis dapat diarahkan pada perwujudan nilai keadilan dan kerukunan. Dalam perspektif jangka panjang, pengelolaan lingkungan yang baik merupakan persyaratan bagi terwujudnya kemandirian suatu bangsa yang didukung berbagai komunitas lokal yang kuat. Sebagian fungsi lingkungan dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, misalnya untuk pengembangan eko-tourisme berporos pada budaya lokal. Oleh sebab itu, selain nilai bebas korupsi dan kerukunan, pengelolaan lingkungan juga dapat diarahkan untuk mewujudkan kemandirian suatu masyarakat kecil yang tersebar diberbagai sudut tanah air. Selain nilai empati dan amanah, 10 (sepuluh)

nilai budaya dasar lainnya merupakan nilai penentu kemandirian suatu masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

- (1) Pemulihan pendekatan pembangunan yang tidak tepat, terutama dikaitkan dengan amat UUD 1945 (untuk menciptakan keadilan sosial), merupakan awal dari timbulnya kerusakan lingkungan berskala massif di berbagai tempat. Terjadinya kerusakan lingkungan, kemiskinan dan kesenjangan sosial yang tajam merupakan konsekuensi logis dari pilihan pendekatan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan sentralisasi kekuasaan. Perkembangan nilai budaya kemajuan bangsa tertekan dari dua sisi, yaitu dari sisi pertumbuhan ("keserakahan") ekonomi dan dari sisi kekerasan politik melalui sentralisasi kekuasaan yang berlangsung relatif lama (lebih dari 30 tahun).
- (2) Nilai budaya keserakahan, yang berkembang sejajar dengan masuknya nilai kapitalisme global, secara sistematis telah menyusup dalam kegiatan pembangun nasional yang berporos pada pemacuan pertumbuhan ekonomi. Kerusakan lingkungan merupakan bagian dari merebaknya budaya kekerasan antar manusia (ekonom, politik, sosial dan fisik) dan sekaligus bentuk akhir dari tindak kekerasan manusia ("masyarakat") terhadap alam. Ketidnyamanan hidup karena banjir rutin (setiap musim hujan), kenaikan suhu udara, kekeringan, dan erosi merupakan beberapa bentuk "pembalasan" alam terhadap tindakan keserakahan manusia.
- (3) Kerusakan lingkungan yang terjadi secara massif pada berbagai tempat di hampir segala penjuru tanah air menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam melakukan pengelolaan lingkungan atau sumberdaya milik bersama (*common property*) sangatlah lemah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa dari tingkat nasional hingga tingkat komunal telah terjadi kerusakan nilai budaya. Nilai budaya (komposit) yang sangat tinggi tingkat kerusakannya adalah nilai keadilan (bebas korupsi) dan kerukunan (solidaritas atau kegotong-royongan). Sedangkan nilai kemandirian juga lemah, namun dikaitkan dengan kerusakan lingkungan tingkat kerusakannya relatif kecil.
- (4) Kemiskinan dan kesenjangan yang tajam secara multidimensional merupakan bagian dari gejala kerusakan nilai budaya; dan berlangsung seiring dengan kerusakan lingkungan. Dapat dikatakan, di mana terdapat kemiskinan yang parah dan kesenjangan sosial yang tajam di situ akan ditemukan kerusakan lingkungan yang parah pula. Munculnya gejala kemiskinan massal dapat dijadikan indikator kerusakan lingkungan dan kerusakan nilai budaya, dan sekaligus bagian dari indikator kegagalan penyelenggaraan pembangunan.

- (5) Dalam rangka menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar di abad 21, sesuai cita-cita pendiri republik ini, diperlukan penguatan (kembali) nilai-nilai budaya bangsa. Penguatan nilai budaya ini diawali dari memodernisasi nilai-nilai budaya lokal. Kekayaan dan keragaman nilai-nilai budaya lokal, yang telah diperkaya dan disesuaikan dengan dinamika masyarakat masa kini dan mendatang, merupakan modal budaya yang masih mungkin diperbaharui untuk membangun Indonesia sebagai bangsa besar di abad 21.
- (6) Dalam rangka memperkuat kembali nilai-nilai budaya bangsa melalui gerakan budaya bangsa diperlukan sejumlah prasyarat, yaitu: a) Dibutuhkannya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, terutama dilihat dari pengetahuan tentang lingkungan, empati sosial, spirit untuk bekerjasama, apresiasi terhadap prestasi dan perkembangan ilmu pengetahuan; b) Adanya kepemimpinan yang memiliki integritas dan kapabilitas yang tinggi di tingkat lokal dan nasional. Cirinya adalah berpikir dengan visi (jauh) ke depan dan implementatif, inspiratif, pemecah konflik yang andal, bagus dalam komunikasi, berpengetahuan tinggi, aktruistik, rasional dan demokratis; c) Terbangunnya manajemen sosial yang sehat yang dicirikan bahwa sistem pengambilan keputusan mengikuti asa kolektivitas, transparansi, logis dalam argumentasi, rasional, demokratis dan tingkat akuntabilitasnya relatif tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosukarto, I.I.C. 2005. Ruang Dinamis untuk Peneliti. *Harian REPUBLIKA*, 3 Juli 2005, (2):1-5.
- Bookchin, M. 1982. *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy*. Chesire Books. Palo, Alto. California.
- Dumont, R. 1971. *Agriculture as Man's Transformation of The Rural Environment*. In I. Shanin (ed.). *Peasants and Peasant Societies*. Penguin Book Inc. Middlesex.
- Grootaert, C. 1998. *Social Capital: The Missing Link?. Environmentally and Socially Sustainable Development*. The World Bank.
- Habisch, E.A. 1999. *Social Capital, Poverty Reduction and 'Gesellschaftsord-nugspolitik*. 'Workshop of the Workshop' 2 Conference, June, 9-13, IUB. <http://www.indiana.edu/~workshop/wow2/publications/jum1199.pdf>. [19/03/2004].
- Lombart, D. 2000. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*. Penerbit P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Odum, E.P. 1971. *Fundamentals of Ecology*. W.B. Saunders Company. Philadelphia.
- Pranadji, T. 2005. *Pemikiran ke Arah Pengembangan Nilai-nilai Sosial Budaya Bangsa*. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, (7):44-58, 2005.

- Steward, J.H. 1955. *Theory of Cultural Change: The Methodology of Multilinear Evolution*. University of Illinois Press. Urbana.
- Thijsse, J.P. 1982. Apakah Jawa Akan Menjadi Padang Pasir?. dalam *Ekologi Pedesaan: Sebuah Bunga Rampai* (Penyunting: Sajogyo). Penerbit C.V. Rajawali. Jakarta.
- Welirang, E. 2005. Catatan Wawancara Terbuka Pengurus ISI Pusat di P.T. Bogasari, 7 Juni 2005. (tidak terpublikasi).
- Wertheim, W.F. 1976. *Gelombang Emansipasi: Evolusi dan Revolusi yang diperbaharui. Gerba Budaya dan ISAI dengan dukungan KITLV*. Jakarta.